

**REKONSTRUKSI HUKUM KOPERASI
DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN BURUH
BERBASIS KEADILAN**

ABSTRAK

Pasu Malau

Peran Koperasi dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat adalah sangat di harapkan oleh masyarakat Indonesia sebagai Soko Guru Perekonomian nasional maka penulis tertarik untuk membahas akibat Soko Guru Perekonomian nasional. Sedangkan masalah adalah 1. Betulkan koperasi saat ini belum mampu mewujudkan peningkatan perekonomian buruh yang berbasis keadilan ? 2. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam koperasi dalam Peningkatan Perekonomian Buru yang berbasis keadilan? 3. Bagaimana Rekonstruksi Hukum Koperasi yang lebih mendukung peran koperasi dalam peningkatan perekonomian sebagai Soko Guru?

Sedangkan menjadi tujuan untuk : 1. Mengetahui peran Koperasi yang belum mampu meningkatkan perekonomian buruh yang berbasis keadilan.2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Perkoperasian dalam Peningkatan Perekonomian Buruh di Indonesia khususnya di PTPN IV Unit Bah Butong-Sidamanik3. Untuk mengetahui pasal-pasal mana yang perlu di Rekonstruksi supaya tujuan Koperasi lebih maksimal sebagai Soko Guru Perekonomian Buruh dalam Perkoperasian sebagai Field Research Bah Butong.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan juridis normatif dan juridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di PTPN IV Perkebunan Teh Unit Bah Butong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun. Faktor-faktor penyebab : 1. Tidak adanya keseriusan para pengurus Koperasi untuk mengurus koperasi di jajaran unit Bah Butong baik dari pihak atasan apalagi dari pengurus sendiri. 2. Kurangnya modal/Skill dari pengurus Koperasi sehingga kios-kios koperasi jadi tutup, 3. Perlu direkonstruksi ulang pasal-pasalnya guna menjamin kepastian hukum koperasi sebagai soko guru perekonomian buruh.

A. SARAN

1. Sebaiknya Ketua Koperasi di Perkebunan PTP Nusantara IV Unit Bah Butong harus tunggal mengurus Koperasi tanpa diberikan tugas tambahan lain.
2. Dinas Koperasi Kabupaten Simalungun hendaknya membuat daftar data koperasi yang berada di Wilayah kerjanya yaitu Koperasi mana yang sehat dan Koperasi mana yang tidak sehat? Kepada Koperasi yang tidak sehat diberikan Pendidikan dan Pelatihan dari Dinas Perkoperasian minimal sekali dalam setahun
3. Bagi Koperasi yang tidak sehat sebaiknya dibubarkan atau digabungkan dengan Koperasi yang lebih sehat di lingkungan sekitarnya.

Key-words: rekonstruksi peran koperasi dalam peningkatan perekonomian buruh

COOPERATIVE LAW RECONSTRUCTION
IN INCREASING WORK RECOMMENDATIONS
JUSTICE BASED

ABSTRACT

Pasu Malau

The Role of Cooperatives in Improving the Community's Economy is highly expected by the people of Indonesia as the Soko Guru for the national economy, so the authors are interested in discussing the effects of the Soko Guru for the national economy. While the problem is 1. Is it true that the cooperative is not yet able to realize an increase in the labor economy based on justice? 2. What are the barriers that occur in cooperatives in improving the hunt economy based on justice? 3. How is the Reconstruction of Cooperative Law which further supports the role of cooperatives in improving the economy as a pillar of teacher?

While the objectives are to: 1. Know the role of cooperatives that have not been able to improve the labor economy based on justice. 2. To find out the barriers to Cooperatives in Improving Labor Economy in Indonesia, especially in PTPN IV Bah Butong-Sidamanik Unit 3. To find out which articles need to be Reconstructed so that the objectives of the Cooperative are maximized as Soko Guru in Workers' Economy in Cooperatives as Field Research Bah Butong.

This research is analytical descriptive with the method of normative juridical approach and empirical juridical approach. This research was conducted at PTPN IV Tea Plantation Bah Butong Unit Kecamatan Sidamanik Simalungun Regency. Factors causing: 1. There is no seriousness of the management of the Cooperative to take care of cooperatives in the ranks of the Bah Butong unit both from the boss, especially from the management themselves. 2. Lack of capital / skills from the Cooperative management so that the cooperatives' kiosks are closed, 3. The articles need to be reconstructed to ensure the legal certainty of the cooperative as a pillar of the labor economy.

A. SUGGESTIONS

1. It is recommended that the Chairperson of the Cooperative in the PTP Nusantara IV Plantation Bah Butong Unit must be single to take care of the Cooperative without being given any additional duties.
2. The Simalungun Regency Cooperative Office should make a list of data of cooperatives in their working area, which are cooperatives that are healthy and which cooperatives are unhealthy? Unfair Cooperatives are given Education and Training from the Department of Cooperatives at least once a year
3. For unhealthy cooperatives should be dissolved or combined with healthier cooperatives in the surrounding environment.

Key words: *reconstruction of the role of cooperatives in improving the labor economy .*